**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Keberadaaan ruang terbuka hijau (RTH) sangat penting pada suatu wilayah perkotaan. Di samping sebagai salah satu fasilitas sosial masyarakat, RTH kota mampu menjaga keserasian antara kebutuhan ruang antara aktivitas masyarakat kota dengan kelestarian bentuk lansekap alami wilayah itu. Oleh karena itu, pemerintah kota dituntut mampu menjaga keserasian keduannya. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatan pemanfaatan fungsi lindung kota, dengan menentukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan RTH kota, agar berbagai manfaat kota tersebut dapat diperoleh.

Penghijauan perkotaan yaitu menanam tumbuh-tumbuhan sebanyak-banyaknya di halaman rumah atau dilingkungan sekitar rumah maupun dipinggir jalan, apakah itu berbentuk pohon, semak, perdu, rumput atau penutup tanah lainnya, di setiap jengkal tanah yang kosong yang ada dalam kota dan sekitarnya, sering disebut sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Ruang terbuka hijau sangat penting, mengingat tumbuh-tumbuhan mempunyai peranan sangat penting dalam alam, yaitu dapat dikategorikan menjadi fungsi lansekap (sosial dan fisik), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi estetika (keindahan). Berdasarkan kepada fungsi utama ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi (Zoer’aini Djamal Irwan, *2005:85*):

1. Pertanian perkotaan, fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan hasilnya untuk konsumsi yang disebut dengan hasil pertanian kota seperti hasil hortikultura.
2. Taman kota, mempunyai fungsi utama untuk keindahan dan interaksi sosial
3. Hutan kota, mempunyai fungsi utama untuk peningkatan kualitas lingkungan.

Penataan Ruang Kota mampu memberikan upaya preventif dan rehabilitasi lebih pada ruang terbuka hijau sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam perwujudannya, kenyamanan tersebut dapat ditandai dengan (White, Rodney R, *1994:24)*:

1. Tempat untuk hidup dan mencari penghidupan;
2. Aksesibilitas dan transportasi;
3. Kondisi lingkungan;
4. Hubungan antara lingkungan fisik dan sosial;
5. *Privacy and neighbourliness*;
6. Kelenturan (*flexibility*).

Dalam upaya menjaga kelestarian ruang terbuka hijau telah dibentuk berbagai macam peraturan dan standar mengenai jumlah dan luasan minimal dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan, ternyata perwujudannya masih terbentur pada berbagai persoalan, salah satunya adalah permasalahan lahan.

Tidak dapat dipungkiri kenyataanya, bahwa dewasa ini, di tanah air kita khususnya di wilayah perkotaan, lahan ruang terbuka telah berubah fungsi menjadi bangunan-bangunan permanen yang merupakan lingkungan pemukiman, perkantoran, pasar, terminal, dan sebagainya. Bangunan-bangunan tersebut dilengkapi pula dengan jalan dan halaman dari aspal atau beton yang mengakibatkan daya resap air ke tanah berkurang. Perubahan lingkungan di atas mempunyai dampak yang negatif. Dalam hal kesegaran udara, udara akan dipenuhi oleh karbondioksida yang diakibatkan oleh padatnya lalu lintas kendaraan bermotor serta buangan industri. Dampak lainnya adalah dalam hal penyediaan air. Sekarang telah sama-sama dirasakan bahwa di musim kemarau, sumur-sumur di banyak kawasan perumahan telah kering, karena tanah tidak dapat menyimpan air lagi. Sebaliknya pada musim hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah, menyebabkan genangan-genangan air dan banjir.

Berkaitan dengan hal di atas, sebenarnya manusia jugalah yang bertanggung jawab atas perubahan lingkungan tersebut. Akibat ulah manusia yang seringkali kurang bijaksana, kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya terpadu untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali mutu lingkungan tersebut, demi kelestariaanya di masa yang akan datang.

Pengembangan kawasan lindung di perkotaan dilandasi oleh Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU tersebut sebenarnya telah mendefinisikan kawasan lindung sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestariaan lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Jadi kelestarian lingkungan hidup tersebut bisa diciptakan dengan menggunakan sumber daya alam yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, Departemen Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Tujuan dalam PERMENPU No. 5/2008 tentang RTH kota diantaranya adalah: (1) Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman, segar, indah, dan bersih, serta sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan, dan (2) menciptakan keserasiaan lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemeliharaan RTH kota di prioritaskan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan mempertimbangkan aspek keindahan dan diwujudkan dalam berbagai jenis RTH kota yang terpelihara dari kerusakan.

Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung setiap tahun semakin berkurang, hal tersebut disebabkan terjadinya perubahan fungsi yang semula berupa lahan terbuka menjadi terbangun untuk berbagai keperluan seperti perumahan, industri, pertokoan, kantor, dan lain-lain. Semakin sempitnya RTH, khususnya taman dapat menimbulkan munculnya kerawanan dan penyakit sosial sifat individualistik dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukan di masyarakat perkotaan. Disamping ini semakin terbatasnya RTH juga berpengaruh terhadap peningkatan iklim mikro, pencemaran udara, banjir dan berbagai dampak negatif lingkungan lainnya. (Litbang dan PPSDAL-UNPAD ringkasan eksekutif pengkajian pola penghijauan di Kota Bandung : 2003).

Luas total RTH Publik kota Bandung hanya sebesar 1.018,54 ha atau (6,1 %) dari luas keseluruhan Kota Bandung, ini mengindikasikan bahwa luas RTH Publik kota Bandung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 20% dari luas wilayah suatu kota. Sementara kondisi eksisting hanya 6,1% berarti Kota Bandung harus memenuhi kebutuhan RTH kotanya sebesar 13,9% (Dinas Pertamanan : 2013). Mengingat permasalahan lahan di Kota Bandung yang sangat kompleks, mulai dari menipisnya keberadaan lahan yang kosong, banyak terjadinya praktek perubahan fungsi kawasan lindung menjadi budidaya contohnya di kawasan Babakan Siliwangi, dan yang paling berpengaruh terhadap menipisnya RTH di Kota Bandung adalah kebutuhan masyarakat akan lahan di perkotaan yang semakin tinggi sementara lahan kosong yang tersedia sudah menipis, akibatnya banyak terjadi perubahan fungsi lahan dan dampak yang terjadi secara langsung adalah RTH yang ada, dari waktu ke waktu kian terancam keberadaanya.

Dengan demikian diperlukannya suatu strategi untuk menanggulangi permasalahan diatas, bagaimana optimalisasi dan mengefektifkan RTH yang sudah ada atau menambah kualitas maupun kuatitas RTH untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan di Kota Bandung bagi peruntukan ruang terbuka hijau.

**1.2 Perumusan Masalah**

Kebijakan, rencana dan program pembangunan RTH, khususnya taman di Kota Bandung masih belum jelas, sehingga telah mengakibatkan pembangunan dan pengelolaan taman tidak berjalan dengan baik. Hal ini diindikasikan dari menurunnya jumlah dan luas taman karena perubahan fungsi, tidak adanya kejelasan tentang batasan taman, serta masih banyaknya taman yang kurang terawat. Penanganan penataan RTH saat ini belum dilaksanakan secara maksimal dan efektif sehingga luas dan kualitas RTH menurun terus. Oleh karena itu dibutuhkan adannya suatu strategi penyediaan RTH kota sebagai acuan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian RTH kota.

Ruang terbuka hijau yang teridentifikasi terdiri dari berbagai tipe (kategori) yang tersebar di wilayah-wilayah Kota Bandung, yaitu Wilayah Cibeunying, Bojonegara, Karees, Ujung Berung, Tegal Lega dan Gede Bage.

Berdasarkan kategorisasinya, RTH di Kota Bandung tersebar secara tidak merata berdasarkan luas dan tipe RTH-nya. Misalnya wilayah kota dengan RTH terluas dapat ditemukan di wilayah Ujung Berung (351,76 ha), sementara Wilayah Karees merupakan wilayah dengan luasan RTH terkecil (26,77 ha). (*Masterplan* RTH Kota Bandung 2007-2027)

Luas total RTH Publik kota Bandung hanya sebesar 1.018,54 ha atau (6,1 %) dari luas keseluruhan Kota Bandung, ini mengindikasikan bahwa luas RTH Publik kota Bandung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 20% dari luas wilayah suatu kota. Sementara kondisi eksisting hanya 6,1% berarti Kota Bandung harus memenuhi kebutuhan RTH Publik kotanya sebesar 13,9% (Dinas Pertamanan : 2013).

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentunya akan menimbulkan pertanyaan penelitian sebagai identifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajian dari penelitian ini. Sehingga dapat didapat solusi terhadap setiap masalah yang ada. Identifikasi masalah penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Apa yang menjadi hambatan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 20% dari luas lahan kota?*
2. *Strategi apa yang bisa dilakukan dalam upaya mengoptimalkan ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik di perkotaan sebesar 20%?*

**1.3 Tujuan dan Sasaran**

**1.3.1 Tujuan**

Studi ini mengkaji keadaan dan memberikan arahan dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bandung. Hasil studi ini dapat menjadi informasi bagi pihak pemerintah daerah dan instansi terkait yang menangani penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK), agar memiliki arahan yang berkaitan dengan penataan RTHK dalam menjaga kelestariaanya.

Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah ***merumuskan Potensi Penyedian Ruang Terbuka Hijau Publik Wilayah Perkotaan di Kota Bandung***

**1.3.2 Sasaran**

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka sasaran studi ini dirumuskan sebagai berikut :

* Mengidentifikasi RTH eksisting Kota Bandung
* Menganalisis permasalahan penyediaan ruang terbuka hijau publik Kota Bandung
* Menganalisis potensi penyediaan ruang terbuka hijau publik Kota Bandung
* Menyusun strategi penyediaan RTH Publik di Kota Bandung.

**1.4 Ruang Lingkup Studi**

Lingkup studi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah merupakan batasan wilayah kajian secara geografis, sedangkan ruang lingkup materi merupakan pembahasan materi yang akan dibahas dalam studi ini.

**1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Lingkup wilayah kajian dari perencanaan ruang terbuka hijau ini yaitu Kota Bandung. Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 1070 – 430 Bintang Timur dan 60 00 – 60 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan administrasi, Kota Bandung meliputi 30 Kecamatan yaitu : Kecamatan Andir, Antapani, Arcamanik, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Buahbatu, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cicendo, Cidadap, Cinambo, Coblong, Gedebage, Kiara Condong, Lengkong, Mandalajati, Panyileukan, Rancasari, Regol, Sukajadi, Sukasari, Sumur Bandung dan Kecamatan Ujungberung.

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

* Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
* Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
* Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung

Alasan pemilihan Kota Bandung sebagai objek penelitian ini karena Kota Bandung merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dari Provinsi Jawa Barat yaitu Bandung Raya sehingga pembangunan sarana dan prasarana penunjang akan semakin bertambah. Untuk menjaga keseimbangan lingkungannya perlu ada penataan dari ruang terbuka hijau agar konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat tercapai.

**Gambar 1.1**

**Peta Administrasi Kota Bandung**

**1.4.2 Ruang Lingkup Materi**

Tujuan penelitian ini, yaitu merumuskan strategi penyediaan RTH Publik serta memaksimalkan RTH yang sudah ada sehingga diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut maka batasan penataanya pun berdasarkan tiga aspek pertimbangan penentuan strategi. Penataan secara fisik hanya sebatas penataan kondisi fisik RTHK yang meliputi sebaran, kebutuhan, luasan, kualitas dan kuantitas penataannya, sedangkan dalam aspek fungsional yaitu penataan fungsi RTHK sesuai dengan rencana, dan berdasarkan aspek menejerial yaitu meliputi lembaga yang menatanya, aturan yang mengatur serta proses penataannya.

Selain batasan penataan, dalam hal mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka kajian strategi Penataan RTHK di Kota Bandung meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi kondisi eksisting RTH Kota Bandung
2. Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam penyedian serta penerapan suatu strategi berdasarkan kondisi eksisting.
3. Faktor-faktor yang menjadi pontensi dalam penyedian berdasarkan kondisi eksisting.
4. Rumusan strategi penyediaan dan optimalisasi RTH Publik

**1.5 Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentunya akan lebih baik apabila mengunakan metode-metode yang terstruktur agar lebih mudah. Untuk lebih jelasnya mengenai metode penelitian dapat dilihat pada uraian berikut ini.

**1.5.1 Metode Pendekatan Studi**

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu dilakukan beberapa pendekatan studi diantaranya mempelajari bahan-bahan bacaan berupa data-data tentang wilayah kajian, perizinan, Undang-undang, artikel lain dari internet guna menunjang informasi mengenai wilayah kajian yang telah ditetapkan, dalam hal ini wilayah kajian tersebut adalah Kota Bandung. Metode pendekatan studi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur tentang ruang terbuka hijau, tujuan ruang terbuka hijau, fungsi ruang terbuka hijau, dan jenis-jenis ruang terbuka hijau.
2. Melakukan identifikasi terhadap karakteristik Kota Bandung yang mempengaruhi pola dan perkembangan ruang terbuka hijau di masa yang akan datang.
3. Mengidentifikasi potensi lahan ruang terbuka hijau dan lahan belum terbangun yang memiliki potensi untuk dijadikan ruang terbuka hijau.
4. Menentukan penyebaran ruang terbuka hijau di Kota Bandung berdasarkan analisis dan identifikasi karakteristik kegiatan perkotaan yang ada.
5. Menata RTHK Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melihat kondisi eksisting terlebih dahulu.

**1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah tentunya di butuhkan data-data yang akurat untuk mendukung proses analisis guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tentunya membutuhkan data-data baik berupa data primer yang langsung diperoleh dari lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, orang yang telah melakukan penelitian sebelumnya serta wawancara untuk mengetahui pendapat-pendapat dari masyarakat umum.

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu obyek pada saat tertentu.

1. Survei Primer merupakan survei dengan cara mendapatkan data-data yang langsung dicari dan dikumpulkan oleh sang peneliti ke objek pengamatannya dan cara pengumpulannya melakukan wawancara baik secara lisan atau tanya jawab. Adapun cara untuk mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

* Observasi Lapangan dan Dokumentasi

Observasi lapangan dilakukan dalam rangka pengamatan wilayah yang dipandang dari berbagai segi kegiatan. hal ini dimaksudkan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan oleh rencana tata ruang dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan gambar dengan maksud untuk memperlihatkan kondisi eksisting di wilayah tersebut.

1. Survei sekunder yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tugas akhir ini. Survei ini dilakukan dengan mengunjungi instansi-instansi yang ada di Kota Bandung yang berkaitan dengan pengelolaan RTHK Kota Bandung. Instansi-instansi tersebut adalah Bappeda Kota Bandung, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, Dinas Bina Marga Kota Bandung, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat, dan Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

**1.5.3 Metode Analisis**

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan bagi keberlangsungan suatu Kota, terutama kota-kota yang ada di Indonesia. Teknis analisis yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

**1.5.3.1 Analisis Ruang Terbuka Hijau Eksisting**

Analisis ini merupakan analisis deskriftif kuantitatif, dimana analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

**1.5.3.2 Analisis Pola Penyebaran RTH**

Analisis ini merupakan analisis deskriftif kuantitatif, dimana analisis ini dilakukan untuk mengetahui pola penyebaran/distribusi ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

**1.5.3.3 Analisis Permasalahan Penyedian RTH**

Analisis ini merupakan analisis deskriftif kuantitatif, dimana analisis ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada kaitannya dengan penyedian ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

**1.5.3.4 Analisis Potensi RTH**

Analisis ini merupakan analisis deskriftif kuantitatif, dimana analisis ini dilakukan untuk mengetahui potensi yang bisa dikembangkan dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

**1.5.3.5 Analisis Perumusan Strategi**

Perumusan strategi penyedian yang meliputi peningkatan dan optimaisasi RTH publik wilayah perkotaan di Kota Bandung ini menggunakan *Strategic Management*, yang meliputi analisis *Strength, Weakness, Opportunity,* dan *Threat* (SWOT), sehingga akan diketahui kondisi yang ada dan usaha yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas lingkungan di wilayah Kota Bandung dalam bentuk strategi penyediaan RTH Publik Kota Bandung.

**Gambar 1.2**

**Kerangka Pemikiran**

**Kebijakan**

1. Permen PU No 5 Tahun 2008 tentang RTHK
2. RTRW Propinsi Jawa Barat
3. RTRW Kota Bandung
4. RDTR Kota Bandung

**Rumusan Permasalahan :**

* Adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan ruang terbuka hijau kota sebagai penunjang kualitas ekologis, estetika dan sosial budaya ekonomi dengan kondisi eksisting di Kota Bandung
* Kuantitas RTH Publik di Kota Bandung eksisting belum sesuai dengan aturan yang berlaku,

Analisis Perumusan Strategi Penyediaan dan Optimalisasi RTH Publik Kota Bandung

Analisis Potensi dan Permasalahan Penyedian RTH

**OUTPUT**

**PROSES**

**INPUT**

**Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandung**

Analisis Pola Penyebaran Ruang Terbuka Hijau

Analisis Ruang Terbuka Hijau Eksisting

**Tujuan**

Merumuskan strategi penyediaan dalam bentuk peningkatan dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan di Kota Bandung.

**Sasaran**

1. Mengidentifikasi RTH eksisting Kota Bandung
2. Menganalisis permasalahan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung
3. Menganalisis potensi penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung
4. Menganalisis strategi dan solusi penyediaan RTHK di Kota Bandung.

**Kondisi Eksisting**

* Struktur tata ruang
* Pola Penggunaan Lahan

**Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandung

**1.6 Sistematika Pembahasan**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

Latar belakang studi, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kajian pustaka, metode pendekatan yang digunakan, serta sistematika penyajian akan dijelaskan pada bab ini.

**BAB 2 TINJAUAN TEORI**

Pada bab kedua berisi tinjauan teoritis mengenai berbagai aspek yang melandasi analisis dan kajian pada bab selanjutnya. Tinjauan ini mencakup pengertian dan fungsi RTHK serta potensi pengembangan kualitas lingkungan.

**BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Bab ini membahas kondisi wilayah Kota Bandung, karakteristik wilayah Kota Bandung, yang terdiri dari kondisi fisik, kependudukan, dan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

**BAB 4 STRATEGI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK**

**DI KOTA BANDUNG**

Bab ini merupakan inti dari studi yang membahas mengenai analisis fungsi penataan ruang terbuka hijau perkotaan sebagai pendukung struktur ruang di Kota Bandung yang berwawasan lingkungan yang mencakup: Analisis Ruang Terbuka Hijau Eksisting, Analisis Permasalahan Penyedian RTH, Analisis Potensi RTH, Arahan Pola Penyebaran RTH, Analisis Perumusan Strategi

**BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab terakhir ini menguraikan hasil analisis dalam merumuskan strategi penyediaan RTH Publik Wilayah di Kota Bandung, saran dan studi lanjutan dari hasil studi yang dilakukan.